



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
2022



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi No. 34.A Pati Kode Pos 59115

Telepon : (0295) 381842

Website : //inspektorat.patikab.go.id

Faksimile : (0295) 381025

E-mail : inspektorat@patikab.go.id

**PERNYATAAN REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**

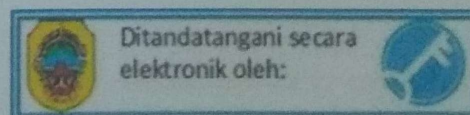
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pati, 7 Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI



AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt., M.M.

Pembina

NIP 19820828 200604 1 009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati tahun 2021 dapat disusun guna memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Pati. Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat *outcomes*, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada tahun 2021.

Secara umum kinerja tahun 2021 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021, serta menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pati dalam penerapan SAKIP, dukungan instansi serta masyarakat sehingga hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pati dapat tercapai dengan baik.

Pati, Maret 2022
BUPATI PATI

HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pemerintahan	2
1.2 Kepegawaian	4
1.3 Kondisi Geografis dan Iklim Daerah	6
1.4 Gambaran Umum Demografi	9
1.5 Isu-isu Strategis	11
1.6 Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022	16
2.2 Indikator Kinerja	19
2.3 Perjanjian Kinerja	22
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
3.2.1 Terwujudnya Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Hukum, Menjaga Ketenteraman Sosial, dan Melestarikan Nilai Unggul Budaya	35
3.2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kualitas serta Pemerataan Akses Pendidikan	37
3.2.3 Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia	39
3.2.4 Penurunan Tingkat Kemiskinan	41
3.2.5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	45
3.2.6 Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktivitas Daerah	51
3.2.7 Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	52
3.2.8 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	55
3.2.9 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	57
3.2.10 Menurunnya Risiko Bencana	62
3.3 Realisasi Anggaran	67
3.4 Capaian Prestasi Tahun 2021	69
BAB IV PENUTUP	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman:
1.1	Daftar Perangkat Daerah	3
1.1.1	Daftar Dinas Daerah	3
1.1.2	Daftar Badan Daerah	4
1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2021	9
1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Per Kecamatan Tahun 2021	10
1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur Tahun 2021	11
2.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	17
2.2	Matrik Program Kegiatan dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pati 2021	23
2.3	Target Belanja Daerah	27
2.4	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2021	29
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	33
3.3	Capaian Kinerja Terwujudnya Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Hukum, Menjaga Ketentraman Sosial, dan Melestarikan Nilai Unggul Budaya	35
3.4	Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	35
3.5	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kualitas serta Pemerataan Akses Pendidikan	37
3.6	Perbandingan Data IPM	38
3.7	Capaian Kinerja Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia	39
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia	40
3.9	Capaian Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan	42
3.10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB	44

Tabel	Judul	Halaman:
	Perkapita Th. 2017-2021	
3.11	Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	46
3.12	Perbandingan Data Indikator Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	50
3.13	Capaian Kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktivitas Daerah	51
3.14	Capaian Kinerja Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	52
3.15	Perbandingan data per tahun Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	53
3.16	Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	55
3.17	Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	57
3.18	Perbandingan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59
3.19	Capaian Kinerja Menurunnya Risiko Bencana	62
3.20	Kejadian Bencana tahun 2021	63
3.21	Perbandingan Indeks Resiko Bencana	64
3.22	Perhitungan Resiko Bencana	65
3.23	Pembuatan Sumur Dalam	65
3.24	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	66
3.25	Anggaran Belanja Daerah Perubahan	67
3.26	Realisasi Anggaran Belanja Prioritas (dalam Rupiah) Tahun 2021	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman:
1.1	Peta Kabupaten Pati	6
3.1	Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai di Kecamatan Gabus	60
3.2	Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai di Kecamatan Pati I	60
3.3	Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai di Kecamatan Pati II	61
3.4	Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Udara	61
3.5	Bencana Banjir di Kecamatan Kayen	63
3.6	Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Tlogowungu	64
3.7	Bencana Kekeringan di Kecamatan Tambakromo	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	5
3.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tahun 2021	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
I	Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (*World Bank*: 1992). Pada dasarnya *good governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, salah satunya adalah akuntabilitas. Sesuai Inpres no 7 tahun 1999, akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia demokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2021 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan serta sebagai wujud transparansi atau keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2021. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2021 adalah:

1. Untuk bahan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tahun 2021;
2. Untuk alat ukur pelaksanaan dan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun;
3. Untuk bahan evaluasi penacapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
4. Untuk alat kendali bagi Kepala Daerah untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi;
5. Untuk bahan masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

1.1 PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan struktur organisasi di Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 39-64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah; Peraturan Bupati Pati nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bupati Pati nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah; Peraturan Bupati Pati nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; serta

Peraturan Bupati Pati nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Inspektorat Daerah, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 21 Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Tabel 1.1
Daftar Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Daerah
5	Badan Daerah
6	Kecamatan

Sumber: Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019

Tabel 1.1.1
Daftar Dinas Daerah

NO	DINAS DAERAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
6	Dinas Kesehatan
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Pertanian

19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
20	Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019

Tabel 1.1.2
Daftar Badan Daerah

NO	BADAN DAERAH
1	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019

Tahun 2017 diadakan pemilihan kepala daerah, hasil akhir rekapitulasi suara secara menyeluruh menunjukkan pasangan calon (Paslon) Haryanto-Saiful Arifin (Harfin), keluar sebagai pemenang Pilkada di Bumi Mina Tani. Paslon tunggal yang diusung oleh delapan, partai itu mendapat 519.675 suara, dari total 697.437 suara sah, dalam gelaran pilkada kali ini suara tak sah mencapai 14.984 sehingga total suara sah dan tidak sah, mencapai 712.421 suara. Jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pati yang mencapai 1.034.256, maka tingkat partisipasi pemilih yang ada sekitar 68,9 persen, hal ini jauh di bawah target partisipasi yang dipatok KPU Pusat dalam gelaran Pilkada serentak 2017, yakni 77,5 persen.

Pemilu legislatif dilaksanakan tahun 2019 menghasilkan 50 orang Anggota DPRD Kabupaten Pati 2019-2024 yang berdasarkan keanggotaan Partai Politik didominasi oleh PDI-P sebanyak 10 orang atau 20 persen dan Partai Perindo di posisi terakhir dengan 1 kursi. Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKB menempati urutan terbanyak kedua dengan masing-masing 6 kursi. Kemudian disusul oleh PPP, Partai Golongan Karya dan Partai Nasdem menduduki masing-masing 5 kursi, sedangkan PKS dan Partai Hanura sebanyak 3 kursi.

1.2 KEPEGAWAIAN

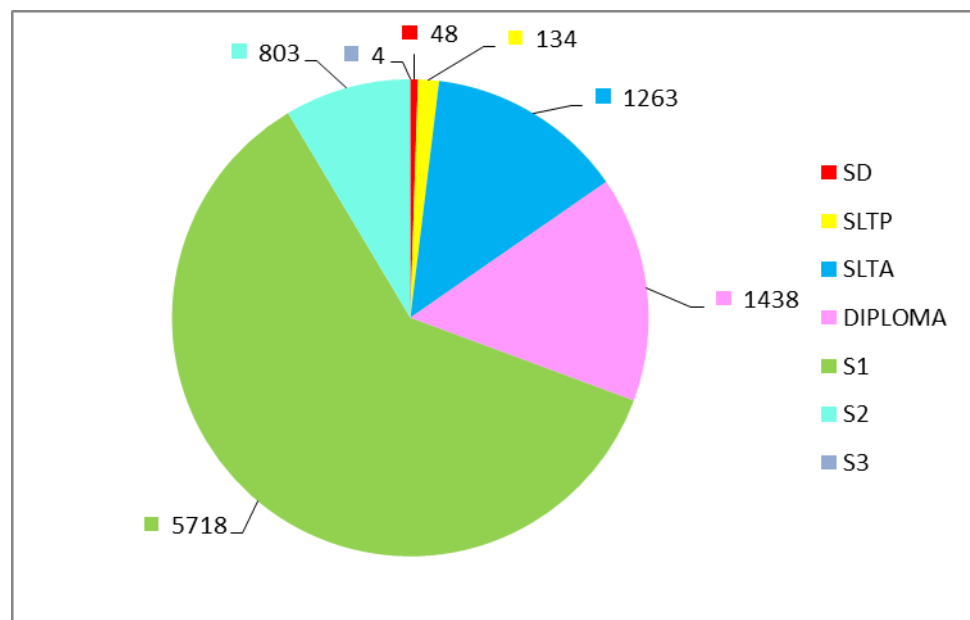
Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk

mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pati pada tahun 2021 adalah sebanyak 9.408 orang dengan jumlah terbanyak adalah golongan III yaitu sebanyak 5.019 orang atau 53,3 persen. Selanjutnya disusul golongan IV sebanyak 2.652 orang atau 28,2 persen, golongan II sebanyak 1.672 orang atau 17,8 persen, dan golongan I sebanyak 65 orang atau 0,7 persen..

Selanjutnya perbandingan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pati tahun 2021 menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :

Grafik 1.1
Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Sumber : Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal PNS di Kabupaten Pati tahun 2021 yang terbanyak adalah Sarjana (S-1) sebanyak 5.718 orang atau 60,78 persen, selanjutnya disusul jenjang pendidikan Diploma sebanyak 1.438 atau 15,28 persen. Sedangkan jumlah yang terkecil adalah jenjang pendidikan S3 yaitu sebanyak 4 orang atau 0,04 persen.

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk

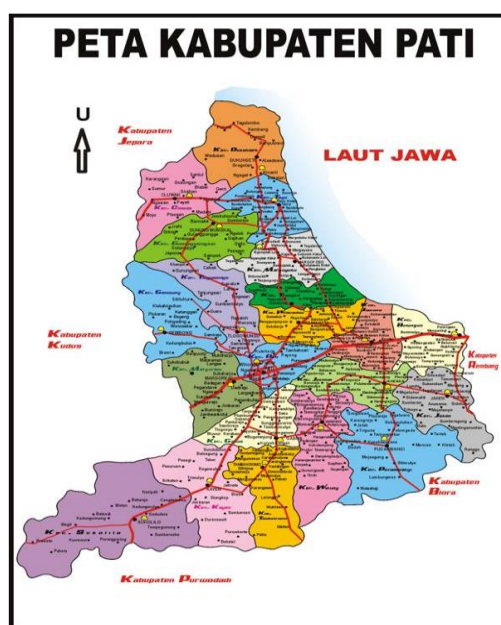
mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM DAERAH

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, jumlah tersebut tidak mengalami perubahan sejak otonomi daerah pada tahun 2001. Pada tahun 2006 jumlah desa/kelurahan bertambah menjadi 406 desa/kelurahan dari 405 desa/kelurahan, karena ada pemekaran desa di Kecamatan Gabus yaitu Desa Pantirejo, yang dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan. Tahun 2017 sampai dengan 2018 jumlah RT/RW sebanyak 7.252 RT dan 1.483 RW, tahun 2019 sampai dengan 2021 ada 7.556 RT dan 1485 RW.

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 100^o,50' - 111^o,15' Bujur Timur (BT) dan 6^o, 25' - 7^o,00' Lintang Selatan (LS) dan mempunyai luas wilayah 150.368 Ha. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten pati sangat strategis karena berada diantara kota-kota pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui jalan nasional Pantura yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya. Wilayah Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan. Secara administratif Kabupaten Pati terbagi dalam 21 Kecamatan yang terdiri dari 401 Desa dan 5 Kelurahan.

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pati



Secara topografi, wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu : lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian utara; dataran rendah, membujur di tengah sampai utara; serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan.

Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2 - 624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus dengan rata-rata ketinggian 3,92 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Gembong dengan rata-rata ketinggian 219,36 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol.

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum, di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

Secara keseluruhan iklim dipengaruhi oleh letak geografisnya. Maka dari itu, Kabupaten Pati beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering.

Menurut RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030, Peruntukan Wilayah Kabupaten Pati terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Apabila dirinci luasan penggunaan kawasan Budidaya di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 21.586 Ha dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.695 Ha dan hutan produksi tetap dengan luas 19.891 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dengan luas kurang lebih 59.332Ha.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 2.249Ha.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar dan dan pengolahan ikan.

Kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai, kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai, dan kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil garis pantai. Luas perikanan budidaya tambak mencapai 10.606 Ha, dan pengembangan perikanan budidaya air tawar mencapai 294 Ha.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas : Mineral, batu bara dan Minyak serta gas bumi.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

- a. Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi di Kecamatan Margorejo (306Ha) dan Kecamatan Pati (200Ha).
- b. Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan (318Ha), Kecamatan Juwana (102Ha).
- c. Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu (30Ha), Kecamatan Trangkil (24Ha), Kecamatan Margoyoso (53Ha), Kecamatan Tambakromo (300Ha), Kecamatan Kayen (48Ha), Kecamatan Sukolilo (117Ha).
- d. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan dimasing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Selain beberapa potensi wilayah yang bisa dikembangkan, Kabupaten Pati juga merupakan satu dari 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Kabupaten Pati merupakan daerah yang berisiko tinggi terjadi bencana dengan skor 171,10 atau kategori tinggi dan menempati peringkat 6 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Ada beberapa bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Pati. Pada musim penghujan Kabupaten Pati merupakan daerah yang rawan terhadap bencana banjir,

banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim, maupun angin topan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Pati yang memiliki 93 sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki wilayah dengan tingkat kemiringan lebih dari 40% dan wilayah yang rawan longsor yaitu wilayah Kecamatan Cluwak, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong dan Pucakwangi. Sedangkan pada musim kemarau di sebagian wilayah Kabupaten Pati juga terjadi bencana kekeringan. Sebagai kabupaten dengan garis pantai yang cukup panjang (± 60 km), bencana gelombang ekstrim dan abrasi juga bisa terjadi di kabupaten ini. Lebih lanjut menurut Badan Geologi, di sebagian wilayah Kabupaten Pati mempunyai tingkat ancaman rendah sampai dengan tinggi untuk bencana gempa bumi. Di Kabupaten Pati pernah menjadi episenter gempa bumi pada tahun 1890 M. Berdasarkan IRBI 2020, indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan menempati urutan ke 89 se Indonesia dengan skor 36 yang berarti kelas risiko tinggi, indeks risiko bencana tanah longsor menempati urutan ke 375 dengan skor 12 yang berarti kelas risiko sedang, indeks risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi menempati urutan ke 166 dengan skor 24 yang berarti kelas risiko tinggi, indeks risiko bencana kekeringan menempati urutan ke 216 dengan skor 24 yang berarti kelas risiko tinggi, dan indeks risiko bencana cuaca ekstrim menempati urutan 33 dengan skor 20,40 yang berarti kelas risiko tinggi.

1.4 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Pati sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 1.349.172 jiwa dengan perincian laki-laki 671.225 jiwa dan perempuan 677.947 jiwa dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,78 persen dari tahun 2020. Peningkatan ini berdasarkan kondisi dinamis masyarakat Kabupaten Pati dilihat dari angka kelahiran, kematian, datang dan pindah penduduk yang teradministrasi di Kabupaten Pati. Kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Pati bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020- 2021

JENIS KELAMIN	TAHUN 2020	%	TAHUN 2021	%
LAKI-LAKI	667.004	49,83	671.225	49,75
PEREMPUAN	671.632	50,17	677.947	50,25
TOTAL	1.338.636	100	1.349.172	100

Sumber: Diolah dari Data Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Pati 2021

Jika dilihat dari persebaran penduduk tiap kecamatan, Kecamatan Pati menjadi kecamatan dengan penduduk terbesar dan Kecamatan Gunungwungkal adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Jumlah penduduk Kabupaten Pati di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Pati	54.662	56.365	111.027
2	Kecamatan Margorejo	31.380	32.031	63.411
3	Kecamatan Tlogowungu	27.866	27.688	55.554
4	Kecamatan Gembong	24.219	24.134	48.353
5	Kecamatan Juwana	48.211	48.537	96.748
6	Kecamatan Batangan	32.615	22.781	45.396
7	Kecamatan Wedarijaksa	32.286	32.489	64.775
8	Kecamatan Trangkil	31.950	32.232	64.182
9	Kecamatan Tayu	35.372	35.703	71.075
10	Kecamatan Margoyoso	37.827	37.445	75.272
11	Kecamatan Gunungwungkal	19.293	19.410	38.703
12	Kecamatan Cluwak	24.124	24.186	48.310
13	Kecamatan Dukuhseti	31.126	31.035	62.161
14	Kecamatan Jakenan	23.821	24.884	48.705
15	Kecamatan Pucakwangi	24.427	24.431	48.858
16	Kecamatan Winong	32.171	32.971	85.142
17	Kecamatan Jaken	22.977	23.873	46.850
18	Kecamatan Kayen	40.343	40.301	80.644
19	Kecamatan Gabus	31.619	32.130	63.749
20	Kecamatan Tambakromo	28.359	28.742	57.101
21	Kecamatan Sukolilo	46.577	46.579	93.156
JUMLAH		671.225	677.947	1.349.172

Sumber: Database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati per Akhir Desember Tahun 2021

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) pada tahun 2021 sejumlah 947.423 jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sejumlah 401.749 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*). Angka beban ketergantungan Kabupaten Pati tahun 2021 adalah

sebesar 42,40 persen. Hal ini berarti setiap 100 penduduk yang produktif menanggung sekitar 42 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kabupaten Pati di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0 – 4	45.539	42.780	88.319
5 – 9	50.940	47.851	98.791
10 – 14	51.921	48.319	100.240
15 – 19	44.844	43.216	88.060
20 – 24	51.421	49.625	101.046
25 – 29	51.565	50.627	102.192
30 – 34	47.881	48.175	96.056
35 – 39	51.197	53.524	104.721
40 – 44	52.266	53.387	105.653
45 – 49	48.363	50.990	99.353
50 – 54	45.277	48.545	93.822
55 – 59	41.424	44.424	85.848
60 – 64	35.195	35.477	70.672
65 – 69	24.258	23.034	47.292
70 – 74	13.728	16.326	30.054
75 +	15.406	21.647	37.053
Jumlah	671.225	677.947	1.349.172

Sumber: Database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati per Akhir Desember Tahun 2021

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021 ada pada kelompok usia produktif (35-39 tahun dan 40-44 tahun) dan yang terendah ada pada kelompok usia tidak produktif (usia 70-74 tahun).

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan

perumusan yang tepat terkait identifikasi permasalahan daerah. Tahun 2021 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2017 – 2022. Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pati serta dengan memperhatikan lingkungan strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan pada tahun 2021.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Pati dapat dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
 - a) Belum optimalnya penanganan masalah kemiskinan,
 - b) Belum optimalnya penanganan peningkatan pertumbuhan ekonomi,
 - c) Tingginya tingkat pengangguran,
 - d) Masih belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
 - a) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik
 - b) Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar;
 - a) Masih diperlukan peningkatan pengelolaan tata ruang
 - b) Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
 - c) Belum optimalnya ketangguhan bencana
 - d) Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis
4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.
 - a) Belum optimalnya nilai investasi
 - b) Kontribusi kategori-kategori pada sektor perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa perlu dioptimalkan,
 - c) Ketahanan pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi dimensional dan sangat penting untuk ditangani secara terpadu dan terarah melalui pelibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, terlebih di masa pandemi Covid 19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, diikuti dengan lesunya iklim usaha serta meningkatnya angka pengangguran yang merupakan dampak dari pandemi covid 19 membutuhkan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan untuk bisa

memberikan terobosan-terobosan yang efektif dalam menuntaskan permasalahan kompleks yang ada.

Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit menular di Kabupaten Pati. Di tahun 2021 kasus kematian ibu hamil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 15 kasus sedangkan untuk tahun 2021 sebanyak 18 kasus, berarti ada kenaikan sebanyak 3 kasus. Dari 18 kasus tersebut 11 kasus mengalami penyerta Covid 19, satu kasus pendarahan, dua kasus preklamsi eklamsi, tiga kasus penyakit jantung, dan satu kasus infeksi paru. Dalam menangani kasus kematian ibu hamil Dinas Kesehatan Pati mengadakan sosialisasi sampai di tingkat desa dan penanganan di Puskesmas. Selama masa pagebluk ini, Dinas Kesehatan juga membekali ibu hamil dengan *swab test* yang disiapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pati. Ibu hamil yang terkonfirmasi dan *suspect* Covid 19 dilayani baik di Puskesmas ataupun apabila dirujuk ke Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

Sejalan dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu adanya perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan meliputi penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Di tengah ketidakpastian harga komoditas pangan yang cenderung kian merangkak naik sehingga menggerus daya beli masyarakat kelas menengah bawah dan juga mendorong inflasi yang cukup signifikan, perlu upaya untuk membuat kebijakan yang difokuskan pada aspek ketersediaan, aksesibilitas dan afordabilitas (harga terjangkau). Disamping itu pembenahan tata niaga komoditas pangan perlu diawasi sehingga dapat menutup celah para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis komoditas yang sangat strategis ini. Diperlukan upaya sinergitas antar sektor yang menangani sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antar pemangku kepentingan yang cenderung saling menyalahkan atau mencari pembenaran sepihak.

Era perdagangan bebas telah memasuki tahap implementasi yang kian waktu semakin luas cakupannya baik dari aspek geografis, poduk atau komoditas yang diperdagangkan serta kesepakatan-kesepakatan teknis hubungan multilateral dalam perpektif perdagangan bebas.

Dampak negatif dari implementasi perdagangan bebas internasional/regional baik *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) maupun *ASEAN Economic Community* (AEC) yaitu pada aspek daya saing produk UMKM. Mengingat masih banyak kendala-kendala

yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan bisnisnya seperti kualitas SDM rendah, sulitnya akses pada sektor keuangan, rendahnya penguasaan teknologi produksi, inovasi maupun pada segi pemasaran.

Pemerintah Daerah harus terus berupaya mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai fasilitasi maupun bantuan teknis/permodalan guna mengangkat daya saing mereka ke tingkat yang lebih kompetitif. Dan tentunya dalam mendorong pengembangan usaha UMKM didasarkan pada penggalan, pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki keunggulan komparatif tetapi juga produk yang kompetitif.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Baik buruknya infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, pengentasan kemiskinan maupun mutu lingkungan hidup. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Pati dalam kategori baik, dihitung dari rerata persentase tercukupinya kapasitas air baku daerah, daerah irigasi dalam kondisi baik, jalan kondisi baik dan jembatan kondisi baik.

1.6 SISTEMATIKA

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pati Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran setrategis dan indikator RPJMD yang digunakan dalam RKPd dan perjanjian kinerja tahun 2020, program beserta anggarannya.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- 2) Lain-lain.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintahan Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu, rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati mengikuti hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan pembangunan daerah menjabarkan atau mengimplementasikan pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu 5 tahun, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari 8 (delapan) misi Bupati terpilih.

Sasaran menjabarkan tujuan berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor: 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 dilakukan pemeriksaan penyelarasan sasaran pembangunan daerah dengan RPJMN.

Tabel 2.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;		
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat • Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai nilai budaya
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan		
2. Meningkatnya derajat	IPM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya status kesehatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan		dan gizi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	IPG (Indeks Pembangunan Gender) IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan
Misi 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan		
4. Penurunan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan Indeks Gini PDRB Perkapita (Rp.)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social
Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan public		
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah
Misi 5: Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja		
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	Nilai PDRB ADHK (=000.000)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Meningkatnya produktivitas KUM
Misi 6: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.		
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi (%) Inflasi daerah (%)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/ sektor pertanian, perdagangan dan industry Meningkatnya Investasi Daerah Meningkatnya daya saing daerah Meningkatkan ketahanan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
		pangan masyarakat
Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.		
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan
Misi 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan		
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kerusakan lingkungan
10. Menurunnya risiko bencana	Penurunan indeks risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana

Sumber: RPJMD tahun 2017-2022

2.2 INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Bupati dalam mengelola Pemerintahan Kabupaten Pati agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikualifikasi, maka diharapkan penetapan indikator utama ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, Pemerintah Kabupaten Pati dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pati digunakan adalah:

- Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya

Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial

Angka ini diperoleh dari 3 variabel yang mengukur keadaan ketenteraman dan ketertiban umum. Yaitu, prosentase penanganan penyakit masyarakat, penanganan kriminal dan penanganan pelanggaran K3 yang mencerminkan masyarakat yang

menjunjung tinggi hukum, menjaga ketentraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya, Sumber data: Data gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Penanggung jawab: Satpol PP Kab. Pati.

- Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia

a. IPG (Indeks Pembangunan Gender)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

b. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

- Penurunan tingkat kemiskinan

a. Tingkat Kemiskinan

Persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.

b. Indeks Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

c. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perkapita

Nilai PDB (Produk Domestik Bruto) atau PDRB atas dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu, PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau persatu orang penduduk.

PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indeks Reformasi Birokrasi

Indek reformasi birokrasi, Menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 8 area perubahan, adalah angka yang dihasilkan oleh PMPRB, Permenpan No 14 tahun 2014. Semakin tinggi angka PMPRB berarti reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik.

- Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah

Nilai PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) (=000.000)

Digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

- Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

a. Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi

Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa

b. Inflasi daerah

IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

IHK = Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga

diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar Pelayanan

Mengambarkan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan dalam yang di tentukan oleh kementerian Pekerjaan Umum.

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai kualitas lingkungan dari suatu kota/kabupaten yang terdiri dari kualitas air, udara dan lahan.

- Menurunnya risiko bencana

Penurunan Indeks Resiko Bencana

Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan *magnitude* dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati 2021 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kabupaten Pati 2021 yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2021 (lampiran I), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 Kabupaten Pati. Ada target dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan lebih optimis dari Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang memiliki *focus stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Tabel berikut memberikan gambaran program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2021 sesuai dengan APBD Kabupaten Pati untuk mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan target-target indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pati tahun 2021:

Tabel 2.2
Matrik Program Kegiatan Dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pati 2021

TUJUAN DAN INDIKATORNYA	PROGRAM				
<p>1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">Indikator Utama</th> <th style="background-color: #FFD700;">Target 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Persentase Penanganan Gangguan Kemanan dan Ketertiban Sosial</i></td> <td style="text-align: center;">77</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2021	<i>Persentase Penanganan Gangguan Kemanan dan Ketertiban Sosial</i>	77	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 4. Program Peningkatan Peran Partai Politik 5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya 7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 8. Program Pengembangan Kebudayaan
Indikator Utama	Target 2021				
<i>Persentase Penanganan Gangguan Kemanan dan Ketertiban Sosial</i>	77				
<p>2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Program Pengelolaan Pendidikan 10. Program Pengembangan Kurikulum 11. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 13. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 				

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM
Indikator Utama	Target 2021	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 14. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 15. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 16. Program Pengendalian Penduduk 17. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 18. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
<i>IPM</i>	72,21	
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia		19. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 20. Program Perlindungan Perempuan 21. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 22. Program Perlindungan Khusus Anak
Indikator Utama	Target 2021	
<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	93	
<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	70	
4. Penurunan tingkat kemiskinan		23. Program Pemberdayaan Sosial 24. Program Rehabilitasi Sosial 25. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 26. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 27. Program Penempatan Tenaga Kerja 28. Program Pendaftaran Penduduk 29. Program Penataan Desa 30. Program Peningkatan Kerjasama Desa 31. Program Administrasi Pemerintahan Desa 32. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 33. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Indikator Utama	Target 2021	
<i>Tingkat kemiskinan</i>	9,51	
<i>Indeks Gini</i>	0,30	
<i>PDRB Perkapita</i>	37.901.200	

TUJUAN DAN INDIKATORNYA	PROGRAM				
	34. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
<p>5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <table border="1" data-bbox="237 710 672 919"> <thead> <tr> <th data-bbox="237 710 505 817">Indikator Utama</th> <th data-bbox="505 710 672 817">Target 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="237 817 505 919"><i>Indek Reformasi birokrasi</i></td> <td data-bbox="505 817 672 919">64,5</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2021	<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	64,5	35. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 36. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 37. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 38. Program Pembinaan Sejarah 39. Program Pembinaan Perpustakaan 40. Program Pengelolaan Arsip 41. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 42. Program Perizinan Penggunaan Arsip 43. Program Perekonomian dan Pembangunan 44. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 45. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 46. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 47. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 48. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 49. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 50. Program Kepegawaian Daerah 51. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 52. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 53. Program Penyelenggaraan Pengawasan 54. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisten 55. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 56. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Utama	Target 2021				
<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	64,5				
<p>6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah</p>	57. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i> </td> <td>34.386.380</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2021	<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	34.386.380		58. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 59. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 60. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 61. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Indikator Utama	Target 2021					
<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	34.386.380					
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi Inflasi Daerah</i> </td> <td>5,64 3,00 -5,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2021	<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi Inflasi Daerah</i>	5,64 3,00 -5,00	62. Program Hubungan Industrial 63. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 64. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 65. Program Penetapan Tanah Ulayat 66. Program Penatagunaan Tanah 67. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 68. Program Promosi Penanaman Modal 69. Program Pelayanan Penanaman Modal 70. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 71. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 72. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 73. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 74. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 75. Program Pemasaran Pariwisata 76. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 77. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 78. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 79. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 80. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator Utama	Target 2021					
<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi Inflasi Daerah</i>	5,64 3,00 -5,00					

TUJUAN DAN INDIKATORNYA	PROGRAM				
	81. Program Penyuluh Pertanian 82. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 83. Program Pengembangan Ekspor 84. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 85. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 86. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 87. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah <table border="1" data-bbox="240 1116 672 1530"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1116 505 1216">Indikator Utama</th> <th data-bbox="505 1116 672 1216">Target 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1216 505 1530"><i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i></td> <td data-bbox="505 1216 672 1530">76,30</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2021	<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	76,30	88. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 89. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 90. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 91. Program Pengembangan Permukiman 92. Program Penatan Bangunan Gedung 93. Program Penyelenggaraan Jalan 94. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 95. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 96. Program Pengembangan Perumahan 97. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 98. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 99. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA) 100. Program Informasi dan Komunikasi Publik 101. Program Aplikasi Informatika
Indikator Utama	Target 2021				
<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	76,30				
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup <table border="1" data-bbox="240 2045 672 2245"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 2045 505 2145">Indikator Utama</th> <th data-bbox="505 2045 672 2145">Target 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 2145 505 2245"><i>Indeks Kualitas Lingkungan</i></td> <td data-bbox="505 2145 672 2245">64,38</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2021	<i>Indeks Kualitas Lingkungan</i>	64,38	102. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sistem Persampahan Regional 103. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 104. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup 105. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Indikator Utama	Target 2021				
<i>Indeks Kualitas Lingkungan</i>	64,38				

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM
<i>Hidup</i>		106. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 107. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 108. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 109. Program Pengelolaan Persampahan
10. Menurunnya risiko bencana		110. Program Penanggulangan Bencana 111. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 112. Program Penanganan Bencana
Indikator Utama	Target 2021	
<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	144	

Sumber: RPJMD tahun 2017-2022

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran belanja Kabupaten Pati Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp2.791.827.542.000,00 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.783.985.271.251,00 (atau 63,90 persen dari total anggaran belanja), Belanja Modal sebesar Rp314.437.523.749,00 (atau 11,26 persen dari total anggaran belanja), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp24.955.000.000,00 atau 0,90 persen dari total anggaran belanja), dan Belanja Transfer sebesar Rp668.449.747.000,00 (atau 23,94 persen dari total anggaran Belanja).

Tabel 2.3
Target Belanja Daerah

Uraian	Target (Rp)	%
Belanja Operasi	1.783.985.271.251	63,90
Belanja Modal	314.437.523.749	11,26
Belanja Tidak Terduga	24.955.000.000	0,90
Belanja Transfer	668.449.747.000	23,94
Total Belanja Daerah	2.791.827.542.000	100

Sumber: APBD Kab. Pati, 2021

Anggaran belanja perubahan untuk keseluruhan program tahun 2021 adalah sebesar Rp1.535.685.073.203,00. Tujuan pembangunan dengan anggaran paling besar adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 50,33 persen dari total keseluruhan anggaran belanja. Tujuan lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan sebesar 30,27 persen dari total keseluruhan anggaran belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia hanya sebesar 0,02 persen dari total keseluruhan anggaran belanja.

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
Tahun Anggaran 2021

TUJUAN SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	%
1) Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	9.366.929.000	0,61
2) Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	464.812.795.700	30,27
3) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	248.969.750	0,02
4) Penurunan tingkat kemiskinan	16.165.401.950	1,05
5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	772.910.942.475	50,33
6) Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	10.338.631.750	0,67
7) Mekuatnya pertumbuhan ekonomi dan daya	38.570.003.600	2,51

saing daerah		
8) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	208.396.596.028	13,57
9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13.449.716.700	0,88
10) Menurunnya risiko bencana	1.425.086.250	0,09
Total	Rp1.535.685.073.203	100,00

Sumber: BPKAD tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana anggaran dibelanjakan, akan tetapi menunjukkan apakah anggaran telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), Pemerintah Kabupaten Pati melaksanakan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun berdasar amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja atau juga disebut *performance* dapat didefinisikan sebagai capaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan *input* bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi

selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan pada setiap akhir tperiode instansi dengan melakukan pengukuran capaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

- Spesifik;
- Dapat dicapai;
- Relevan;
- Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- Dapat dihitung dan diukur.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2021. Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	1. <i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	77	99,48	129,19	SANGAT TINGGI
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	2. <i>IPM</i>	72,21	72,28	100,10	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	3. <i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	93,00	91,60	98,49	SANGAT TINGGI
		4. <i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	70	69,99	99,99	SANGAT TINGGI
4	Penurunan tingkat kemiskinan	5. <i>Tingkat kemiskinan</i>	9,51	10,21	92,64	SANGAT TINGGI
		6. <i>Indeks Gini</i>	0,30	0,31	100	SANGAT TINGGI
		7. <i>PDRB Perkapita</i>	37.901.200	34.605.020	91,30	SANGAT TINGGI
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	8. <i>Indek Reformasi birokrasi</i>	64,5	76,17	118,09	SANGAT TINGGI
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	9. <i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	34.386.380	31.919.708	92,82	SANGAT TINGGI

7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	10. Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi	5,64	3,38	59,93	RENDAH
		11. Inflasi Daerah	3,00-5,00	1,59	147,00	SANGAT TINGGI
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	12. Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	76,30	82,879	108,61	SANGAT TINGGI
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,38	52,35	81,30	TINGGI
10	Menurunnya risiko bencana	14. Penurunan Indeks Risiko Bencana	144	128,14	111,00	SANGAT TINGGI

Sumber: Perangkat Daerah Pemangku IKD tahun 2021

Dari 14 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 12 Indikator Kinerja Daerah telah memenuhi kriteria **sangat tinggi (91-100%)**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai kriteria tinggi yaitu 81,30. Sedangkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi menempati kriteria penilaian rendah, ini merupakan dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi hampir diseluruh dunia.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian ini akan menganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

3.2.1 Terwujudnya Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Hukum, Menjaga Ketenteraman Sosial, dan Melestarikan Nilai Unggul Budaya.

Pemerintah Kabupaten Pati berupaya mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial dan melestarikan nilai unggul budaya. Keberhasilan capaian tujuan strategis ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Terwujudnya Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Hukum, Menjaga Ketenteraman Sosial, Dan Melestarikan Nilai Unggul Budaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	77	99,48	129,19

Sumber : Satpol PP, Tahun 2021

Uraian Kinerja

Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial. Angka ini diperoleh dari tiga variabel yang mengukur keadaan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu penanganan penyakit masyarakat penanganan kriminalitas dan penanganan pelanggaran K3.

Capaian kinerja penurunan penyakit masyarakat Kabupaten Pati pada tahun 2021 sebesar 6% yang berarti sangat rendah, karena hanya mencapai angka 0,42 sedangkan target yang ditetapkan sebesar 7. Angka kriminalitas yang tertangani juga sangat rendah yaitu sebesar 1,44 sedangkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,2. Ini berarti bahwa capaian kinerja kriminalitas yang tertangani hanya sebesar 45%. Untuk capaian kinerja penanganan pelanggaran K3 di Kabupaten Pati tahun 2021 sangat tinggi yaitu sebesar 129,19%, angka ini diperoleh dari realisasi penanganan kriminalitas sebesar 99,48% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 77%.

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Tabel 3.4
Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial

INDIKATOR	DATA	REALISASI	REALISASI	TARGET
	2019	2020	2021	2021
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	76,54	93,75	99,48	77

Sumber : Satpol PP, Tahun 2021

Pada tabel 3.4 di atas menunjukkan realisasi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan

tahun 2020. Walaupun mengalami kenaikan akan tetapi ada beberapa hambatan dan kendala dalam capaian target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Pati, diantaranya: kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras, dan tingkat kejahatan yang tinggi di masyarakat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum dan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam upaya untuk mencapai target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang didukung dengan kegiatan sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan tentang bahaya minuman keras dan dampak penyakit masyarakat, peningkatan kewaspadaan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat, serta patroli dan monitoring penanganan pelanggaran K3 dan penegakan produk hukum daerah (Perda). Operasi Penegakan Perda ini dilaksanakan lima kali dalam sebulan pada lima Eks Kawedanan yaitu Jakenan, Juwana, Kayen, Pati dan Tayu. Dalam hal penanganan penyakit masyarakat oleh Satpol PP ditangani bidang Penegakan Produk Hukum Daerah bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Dinas terkait. Salah satu bentuk penanganan Penyakit masyarakat yang dilaksanakan yaitu operasi karaoke, kost-kost an, salon, minuman keras, dan anak-anak sekolah yang bolos di jam – jam sekolah.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial, strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pati adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, melaksanakan kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat serta kegiatan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini, Satpol PP berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Pati nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Satpol PP mempunyai tiga regu patroli yang beroperasi pagi, siang, dan malam. Dalam hal penanganan pelanggaran K3 oleh Satpol PP ditangani bidang Tibumtranmas, dalam hal penanganan pelanggaran K3, Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Dinas terkait.

Untuk menunjangnya dilaksanakan 6 program sebagai berikut; Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan anggaran total Rp9.794.765.000,00 atau 0,64 persen dari anggaran yang prioritas.

Dengan capaian kinerja 129,19 persen penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya dinilai efisien karena dari anggaran setelah perubahan Rp9.366.929.000,00 terealisasi Rp8.468.447.150,00 atau terserap 90,41 persen efisiensi sebesar 9,59 persen.

3.2.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Kualitas serta Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati tercermin pada capaian Indikator “Indeks Pembangunan Manusia”. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel.3.5
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kualitas serta Pemerataan Akses Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (2021)	REALISASI (2021)	CAPAIAN (2021)
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	72,21	72,28	100,10

Sumber : BPS Kabupaten Pati Tahun 2021

Uraian Kinerja

Pembangunan manusia di Kabupaten Pati pada tahun 2021 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun masih terdampak pandemi Covid-19, IPM Pati tahun 2021 masih mampu tumbuh positif 0,51 poin, dari 71,77 pada tahun 2020 menjadi 72,28 di tahun 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi dasar yang digunakan sebagai dasar perhitungannya yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran per kapita.

Nilai IPM Kabupaten Pati tahun 2021 termasuk dalam kategori tinggi (IPM di atas 70). IPM Kabupaten Pati menempati peringkat ke-19 di Provinsi Jawa Tengah.

Selama periode 2020 hingga 2021, komponen pembentuk IPM Kabupaten Pati juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 76,27 tahun, meningkat 0,05 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2020. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,94 tahun, atau meningkat 0,29 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,48 tahun (SMP Kelas 1) atau meningkat 0,04 tahun. Namun demikian, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan PPP (*Purchasing Power Paraty*) telah mencapai Rp10.506.000,- rupiah, naik sebesar Rp116.000,- dibandingkan tahun 2020 akibat perbaikan kondisi perekonomian walaupun masih dalam pengaruh dampak covid-19 (sumber: BPS Kabupaten Pati tahun 2021).

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Pati terus mengalami kemajuan selama periode 2014 hingga 2021. IPM Kabupate Pati meningkat dari 66,99 pada tahun 2014 menjadi 72,28 pada tahun 2021. Selama periode tersebut rata-rata tumbuh sebesar 1,06 % per tahun. Pada periode 2020-2021, IPM Kabupaten Pati tumbuh sebesar 0,71 % atau meningkat 0,51 poin. Peningkatan pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2019-2020 yang naik sebesar 0,42 poin. Hal ini disebabkan adanya wabah Covid-19 yang telah berdampak paada menurunnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Pati tahun 2020, tetap sudah agak membaik di tahun 2021. Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2019-2021 dan capaian indikator kinerja tahun 2014 sebagai pembanding dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Data IPM

INDIKATOR	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
	2014	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,99	71,35	71,77	72,28

Sumber data : BPS Kabupaten Pati Tahun 2021

Bila pembangunan terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi berjalan dengan baik, setidaknya sama dengan tahun-tahun yang telah berjalan, mengacu

kepada rerata kenaikan IPM Kabupaten Pati, maka target akhir RPJMD dapat dicapai pada akhir tahun RPJMD.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2021 kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut; Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS), semuanya ada 10 program dengan anggaran Rp429.708.013.950,00 atau 28,11 % dari belanja prioritas.

Capaian kinerja meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, sangat tinggi yaitu 100,10 persen, Pemerintah menganggarkan setelah perubahan Rp464.812.795.700,00 terealisasi Rp317.553.699.309,00 atau dengan serapan anggaran 68,32 persen.

3.2.3 Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia.

Upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia ini dilakukan untuk menjamin keadilan pembangunan pada masing-masing gender.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Meningkatnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender, untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IPG (Indeks pembangunan Gender)	93,00	91,60**	98,49
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	70,00	69,99**	99,99

Sumber : BPS Kabupaten Pati Tahun 2021. ** Data Proyeksi

Uraian Kinerja

Keberhasilan tujuan diukur dengan dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2021 target IPG adalah 93 dan realisasi 91,60 artinya capaian kinerjanya sebesar 98,49 persen. Hal Ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Untuk

IDG dari target 70,00 pada tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pati adalah 69,99 atau 99,99 persen.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada capaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan.

Evaluasi dan Analisa kinerja

Sementara capaian IPG Kabupaten Pati di tahun 2021 masih tetap 91,60 sama dengan capaian di tahun 2020, pada tahun 2020 juga sama dengan capaian di tahun 2019 yaitu sebesar 91,60. Sedangkan IDG Kabupaten Pati pada tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 IDG naik menjadi 69,99 dibanding dengan tahun 2019 sebesar 67,30.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,98	91,50	91,60	91,60*	91,60**
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,96	66,55	67,30**	69,99	69,99**

Sumber: BPS Kabupaten Pati Tahun 2021. * data proyeksi ** data sementara

Analisis terhadap masing-masing komponen IPG dilakukan untuk melihat kontribusi tiap komponen terhadap IPG. Rasio Angka Harapan Hidup Kabupaten Pati antara perempuan dan laki-laki di tahun 2020 sebesar 1,043. Hal tersebut menunjukkan derajat kesehatan perempuan di Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan derajat kesehatan laki-laki. Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan terhadap laki-laki Kabupaten Pati Tahun 2021 sebesar 0,86. Rasio HLS perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Pati tersebut menunjukkan tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa derajat ekonomi laki-laki di Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan derajat ekonomi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan terutama di bidang ekonomi dan pendidikan belum berhasil memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam lima tahun terakhir IDG Kabupaten Pati juga menunjukkan tren peningkatan walaupun capaian tahunannya masih fluktuatif dan masih berada di bawah capaian nasional. Komponen yang berperan dalam peningkatan nilai IDG yaitu persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang mengalami peningkatan, diindikasikan dengan peningkatan persentase PNS perempuan di tahun 2021 sebesar 56,88 persen dibandingkan 54,71 persen di tahun 2020, meskipun proporsi di level manajerial lebih sedikit dibandingkan pria. Sementara itu, komponen partisipasi perempuan di lembaga perwakilan rakyat masih di bawah 20 persen yaitu baru ada delapan orang anggota DPRD perempuan dari 50 anggota DPRD yang ada. Komponen lain yang nilainya relatif rendah adalah sumbangan pendapatan perempuan. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dengan perempuan dipengaruhi oleh persentase pekerja laki-laki lebih besar dibanding pekerja perempuan dan tingkat pendidikan pekerja laki-laki lebih tinggi dibanding pekerja perempuan.

Tujuan ini didukung oleh 4 program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Perlindungan Khusus Anak, yang keseluruhan dianggarkan sebesar Rp498.682.450,00 atau 0,03 persen dari belanja langsung yang mendukung program prioritas.

Sedangkan realisasi anggaran yang telah digunakan sebesar Rp232.873.000,00 atau 93,53 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp248.969.750,00.

3.2.4 Penurunan Tingkat Kemiskinan

Dilansir dari buku *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (2015) karya Ali Khomsan dan kawan-kawan, kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kondisi miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan atau karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang

memungkinkan kelompok marginal mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan ekonomi, sehingga tingkat efektivitas kebijakan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan yaitu: Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kemiskinan	9,51	10,21**	92,64
Indeks Gini	0,30	0,31*	100,00
PDRB Perkapita	37.901.200	34.605.020*	91,30

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2021 (data diolah). *angka proyeksi ** angka asumsi

Uraian Kinerja

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pati pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada angka 10,21 hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid 19, dan kenaikan tingkat kemiskinan tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati tapi juga terjadi di daerah kabupaten lain, secara jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 tingkat kemiskinan turun sebesar 9,46% (118.980 jiwa) atau turun sebanyak 4.960 orang dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 9,90%. Dari perspektif Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Keparahan Kemiskinan (P2), yang mengindikasikan jarak antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin serta kesenjangan antar kelompok masyarakat miskin, keduanya menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Tahun 2021 sebesar 1,37 atau turun 10 poin dibandingkan Tahun 2020, dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi sebesar 0,26 atau turun 5 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2021, sebagaimana Tabel 3.9 adalah sebesar 92,64 % dikarenakan adanya pandemi covid 19. Pandemi Covid-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 dan mulai terdeteksi di Kabupaten Pati pada awal April 2020 berdampak terhadap kualitas hidup penduduk, diantaranya pada aspek ekonomi. Beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan yang berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan pada beberapa perusahaan serta penurunan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam sektor informal. Selain itu,

terjadi peningkatan pengeluaran yang ditanggung untuk kebutuhan sehari-hari (bahan makan dan kebutuhan pulsa/paket data) yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat di tahun 2020-2021 sehingga menyebabkan belum tercapainya target pembangunan (sumber: BPS Kabupaten Pati 2021; Profil Masyarakat Kabupaten Pati di Era *New Normal*).

Indeks Gini (IG) yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan masyarakat, pada Tahun 2020 diasumsikan sama dengan realisasi pada 2017, 2018 dan 2019 yaitu sebesar 0,31. Menurut Michael P. Todaro dalam bukunya berjudul *Economic Development in Third World* (Pembangunan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang), Indeks Gini Kabupaten Pati masuk kategori pendapatan yang relatif merata atau relatif sama ketimpangan distribusi pendapatan, karena berada pada kisaran angka 0,2 – 0,35.

Pendapatan perkapita yang direpresentasikan dengan PDRB perkapita ADHB masyarakat Kabupaten Pati pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 31,837 Juta dan diproyeksikan hingga pada Tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. ±34,605 Juta dan Rp. ±36,908 juta atau meningkat rata-rata sebesar 4,68% per tahun, dan Tahun 2020 menjadi tahun *kontraksi* pertumbuhan pendapatan perkapita yaitu sebesar -4,32% karena pandemi Covid-19.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan ditargetkan akan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan. Capaian TPT dan kemiskinan pada Tahun 2018 masing-masing sebesar 3,61% dan 9,90%, dan pada Tahun 2019 menjadi sebesar 3,74% dan 9,46%; Tahun 2020 terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan sehingga menjadi masing-masing sebesar 4,74% dan 10,08%. Sedangkan di tahun 2021, TPT dan kemiskinan diproyeksikan akan semakin membaik/mengalami penurunan yaitu menjadi 4–5% dan 9–10% dan proyeksi di tahun perencanaan (2022) diharapkan kembali menurun menjadi sebesar 3,5–4,5% dan 9,51%. Pembangunan harus juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjukkan dengan semakin tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai manifestasi dari pembangunan manusia seutuhnya. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 IPM Kabupaten Pati telah melewati angka 70 yaitu sebesar 70,71 dan Tahun 2019 menjadi 71,35. Pada Tahun 2020 di tengah pandemi, IPM tetap konsisten mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 71,77. Target Tahun 2021, pasca pandemi Covid-19, yaitu sekitar 71–72,21 dan pada 2022 IPM ditargetkan menjadi sebesar 73,00.

Angka inflasi sebagai salah satu komponen indikator ekonomi makro pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 2,77% dan 2,51%. Hingga Tahun 2022 diekspektasikan pemerintah daerah akan mampu menjaga inflasi tahunan pada rata-rata kisaran 2,5–3,5% guna mendukung kodusivitas perekonomian daerah baik dari sisi

permintaan maupun penawaran (*supply and demand perspectives*) khususnya terhadap pengendalian harga-harga barang kebutuhan yang masuk kategori *non administered prices* (harga barang kebutuhan yang tidak ditentukan oleh pemerintah atau berdasarkan mekanisme pasar).

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 realisasi mencapai angka sebesar 4,60 persen. Peningkatan pengangguran terjadi sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di akhir 2019 hingga saat ini. Keberadaan pandemi tersebut terbukti menurunkan kinerja sektor industri yang selanjutnya menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh oleh perusahaan yang terdampak. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati 2021, terdapat 31 pekerja yang di PHK. Namun demikian, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar mengingat tidak semua perusahaan yang melakukan PHK melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, potensi peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Pati juga dapat berasal dari para pekerja yang bekerja di luar daerah, luar pulau, ataupun luar negeri yang kembali ke daerah karena ketiadaan pekerjaan sebagai dampak langsung dari pandemi covid 19.

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Tabel 3.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan	11,38	9,90	9,46	10,08	10,21**
Indeks Gini	0,31*	0,31*	0,31*	0,31*	0,31*
PDRB Perkapita (Rp. Juta)	29,36	31.81	34,31**	34,18	34,60**

*Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2021. *angka proyeksi ** angka asumsi*

Angka kemiskinan di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2016–2019 cenderung menurun, dimana penurunan terbesar terjadi pada Tahun 2018 menjadi sebesar 9,90 persen (mencapai single digit) dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian di tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,13 poin dari tahun 2020, yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Mengacu pada target kinerja penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yang menargetkan angka kemiskinan menjadi 9,51 persen pada akhir periode, maka capaian angka kemiskinan pada tahun 2021 sementara belum mencapai target RPJMD Tahun 2022. Pandemi covid 19 merupakan permasalahan berat

yang harus dihadapi, sehingga Pemerintah Kabupaten Pati harus melakukan langkah-langkah strategis berupa kebijakan yang efektif untuk terus menekan angka kemiskinan ke depan melalui peningkatan koordinasi kebijakan bidang kesra, peningkatan koordinasi kebijakan bidang ekonomi serta peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan secara lebih terpadu dan komprehensif. Dampak dari kebijakan ini diharapkan memiliki tingkat efektivitas yang signifikan dalam pemerataan distribusi dan peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran serta pengurangan angka kemiskinan.

Untuk menurunkan angka kemiskinan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pati, telah melaksanakan 12 program yaitu; Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pendaftaran Penduduk, Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp24.577.357.650,00 atau 1,61 persen dari seluruh anggaran prioritas dan terserap hingga Rp14.619.748,00 atau 90,44 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp16.165.401.950,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 9,56 persen.

3.2.5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Tahun 2021 adalah tahun ketiga Kabupaten Pati di evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasinya oleh Kementerian PAN dan RB, setelah sebelumnya melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri tersebut mengukur delapan area perubahan dengan delapan indikator proses (faktor penguangkit) dan tiga indikator hasil. Sampai dengan masa pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum diumumkan maka Indikator diukur dengan skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	64,5	76,17	118,20

Sumber data : PMPRB Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021

Uraian kinerja:

Dalam area manajemen perubahan, Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk dengan diterbitkannya SK Bupati Nomor 800/1108 Tahun 2021 untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 86 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pati tahun 2021-2025. Selama tahun 2021 dalam rangka penataan dan harmonisasi peraturan perundangan telah ditetapkan 10 Peraturan Daerah dan 86 Peraturan Bupati.

Penguatan organisasi dilaksanakan dengan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi, mengevaluasi dan menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain serta mengevaluasi dan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Telah dilakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung proses birokrasi namun belum terintegrasi. Indeks SPBE 2019 adalah 3,22, untuk kemudian ada evaluasi kembali sehingga indeks SPBE di tahun 2021 adalah 2,75.

Rekrutmen CPNS dan pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka. Terdapat sistem informasi kepegawaian yaitu SIMPEG BKPP, yang dapat diakses oleh pegawai melalui operator di masing-masing perangkat daerah.

Dalam implementasi manajemen kinerja, pada tahun 2020 Kabupaten Pati memperoleh predikat B dengan Nilai SAKIP 65,04 sementara sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021, nilai SAKIP belum turun. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi e SAKIP.

Seluruh rekomendasi APIP yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang telah dilaksanakan beberapa unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan telah dilakukan perhitungan dengan hasil skor rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,40 (85). Dengan angka Indeks sebesar 3,40, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 85 dan kategori mutu layanan Pemerintah Kabupaten Pati mendapat kategori B (Baik). Nilai tersebut lebih rendah dari capaian nilai SKM pada tahun 2021 yang hanya sebesar 85. Capaian indeks tahun 2021 mengalami peningkatan nilai sebesar 0,02.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang telah dilaksanakan beberapa unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan telah dilakukan perhitungan dengan didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,40. Nilai tersebut termasuk dalam kategori BAIK. Begitu juga jika dilihat dari nilai rata-rata IKM tertimbang dikalikan nilai konversi (25) hasilnya adalah sebesar 85.

Nilai rata-rata IKM tertimbang dan nilai konversi IKM tersebut termasuk dalam kategori mutu pelayanan B dan termasuk dalam kategori Baik. Artinya bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik oleh para penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Capaian indeks SKM Kabupaten Pati tahun 2021 juga mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah walaupun Nilai Rata-Rata semua unsur menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik. Selain itu, untuk unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 3,064 mutu pelayanan B (Baik). Ada 1 (satu) unsur yang nilai indeksnya di atas 3,532 mutu pelayanan A (Sangat Baik) yaitu unsur Biaya/Tarif Pelayanan dengan capaian nilai sebesar 3,61. Berdasarkan hasil survei ini kesemua unsur pelayanan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan terus meningkat. Namun demikian, masih ada beberapa unsur kualitas pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan yakni :

- a. Waktu Pelayanan (Nilai indeks 3,31 dan NRR 3.368)

b. Sarana dan Prasarana (Nilai indeks 3,32 dan NRR 0.369)

Untuk itu sangat penting diprioritaskan dilakukan upaya pembenahan pada kedua unsur tersebut, yakni unsur Waktu Pelayanan dan unsur Sarana Prasarana guna perbaikan kinerja pelayanan dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Rendahnya capaian nilai Unsur Sarana dan Prasarana dan Waktu Pelayanan tersebut merupakan suatu kewajaran terhadap tingkat kepuasan publik. Pasalnya, saat ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Kemunculan pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan guncangan kondisi (*condition shock*) sehingga mempengaruhi siklus keseimbangan dan tatanan kehidupan.

Konteks lingkungan pertama yang amat memengaruhi ekosistem dan tata kelola layanan publik tahun ini adalah lanjutan dan pendalaman dari dampak struktural pandemi COVID-19. Kita tahu, pagebluk ini sungguh telah menguji ketangguhan atau kerapuhan sistem kesehatan, *governabilitas* sektor publik, fundamen ekonomi dan modal sosial yang ada tentu berpengaruh dan sangat wajar terhadap persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, pada awal kemunculannya di Indonesia awal bulan Maret 2020 lalu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menekan penyebaran COVID-19. Terdapat beberapa kebijakan yang diterbitkan selain untuk menekan penyebaran COVID-19 juga untuk tetap semangat meningkatkan kualitas pelayanan demi kepentingan bersama. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, *Work From Home* (WFH), pelayanan berbasis *online*, kebijakan *rapid test* sebagai persyaratan mobilisasi masyarakat, maupun pelayanan publik pada era *new normal* dengan menerapkan protokol kesehatan. Semuanya dilakukan agar pelayanan publik terus hidup dan berjalan.

Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Kondisi demikian, wajar jika masyarakat belum terbiasa dan belum beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebijakan pemberian layanan yang berbeda seperti biasanya. Guna memperkuat layanan di masa pandemi, para penyelenggara pelayanan publik terus berupaya mensosialisasikan informasi dan penyediaan layanan secara *online*. Meskipun berpengaruh terhadap tingkat kecepatan waktu layanan, namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Pati telah berupaya mendukung penekanan tingkat penyebaran COVID-19.

Himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan pembatasan pemberian pelayanan publik ini memang membuat masyarakat menjadi kurang nyaman dalam menerima pelayanan publik, tetapi ini merupakan kebijakan yang saat ini diambil pemerintah adalah upaya untuk membatasi atau menghentikan penyebaran Virus Corona.

Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang *benefit* yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Wabah yang akhirnya menjadi pandemi internasional telah banyak merubah pola hidup, sistem hidup dan kehidupan manusia, termasuk mengguncang sistem pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Situasi pandemi yang memberi dampak begitu dalam terhadap penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat tentu berpengaruh dan sangat wajar terhadap persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19. Terdapat kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang diterbitkan selain untuk menekan penyebaran COVID-19 juga untuk tetap semangat meningkatkan kualitas pelayanan demi kepentingan bersama. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, *Work From Home* (WFH), pelayanan berbasis *online*, kebijakan *rapid test* sebagai persyaratan mobilisasi masyarakat, maupun pelayanan publik pada era *new normal* dengan menerapkan protokol kesehatan. Semuanya dilakukan agar pelayanan publik terus hidup dan berjalan.

Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Kondisi demikian, wajar jika masyarakat belum terbiasa dan belum beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebijakan pemberian layanan yang berbeda seperti biasanya. Guna memperkuat layanan di masa pandemi, para penyelenggara pelayanan publik terus berupaya mensosialisasikan informasi dan penyediaan layanan secara *online*. Meskipun berpengaruh terhadap tingkat kecepatan waktu layanan, namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Pati telah berupaya mendukung penekanan tingkat penyebaran COVID-19.

Adapun yang terkait dengan inovasi pelayanan di beberapa unit layanan/Perangkat Daerah juga semakin meningkat. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan mampu melakukan terobosan layanan yang baik, efektif dan efisien. Bahkan

inovasi layanan yang diimplementasikan tersebut telah tercatat sebagai 10 (sepuluh) inovasi pelayanan terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah, yaitu SIM ULP Kabupaten Pati TOP pada tahun 2018 dan *Cluwak Pregnancy Tool* pada tahun 2019, sementara di tahun 2020 Kabupaten Pati masuk dalam TOP 99 di tingkat nasional.

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Tabel 3.12
Perbandingan Data Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	65,2	69,15	70,74	66,63	76,17

Sumber : PMPRB Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021

Dari tahun ke tahun skor PMPRB Kabupaten Pati meningkat dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pati ada pada angka 66,63, hal ini menunjukkan adanya penurunan, dikarenakan adanya penambahan aspek dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian baik pada komponen pengungkit maupun hasil yang pada tahun sebelumnya belum ada dan hanya memakai aspek pemenuhan saja, sementara di tahun 2020 penilaian harus memenuhi tiga aspek yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara dan aspek reform. Namun demikian pada tahun 2021 aspek dan indikator pada komponen pengungkit maupun hasil dapat dipenuhi sehingga skor PMPRB meningkat menjadi 76,17. Kabupaten Pati menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi pada akhir masa RPJMD sebesar 65, dalam arti target sudah bisa tercapai sebelum masa akhir periode.

Untuk meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat Kabupaten Pati memiliki Mal Pelayanan Publik yang dapat memberikan kemudahan dalam mengurus berbagai jenis layanan publik baik yang terkait dengan perizinan, non-perizinan, maupun administrasi kependudukan masyarakat dari berbagai instansi dalam satu tempat. Hadir sebagai MPP ke - 33 di Indonesia, Mal Pelayanana Publik (MPP) Kabupaten Pati berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyatukan 305 layanan perizinan dalam 22 gerai yang terdiri dari 13 perangkat daerah dan 9 instansi vertikal.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung anggaran sebesar Rp745.234.633.575,00 digunakan untuk mencapai tujuan daerah tahun 2021 dengan menjalankan : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Program Pembinaan Sejarah, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, seluruhnya menggunakan 48,75 persen dari total belanja untuk pembiayaan program prioritas.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah mengalokasikan Rp772.910.942.475,00 dalam perubahan, yang terserap Rp756.879.403.094,00 dengan capaian kinerja mencapai 118,20 persen. Penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, karena dengan 97,93 persen anggaran telah dapat mendukung tercapainya target, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar 2,07 persen.

3.2.6 Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal Dan Produktivitas Daerah

Tingkat kesempatan kerja dan produktivitas daerah adalah dua hal yang sangat berkaitan karena untuk mengetahui tingkat produktivitas daerah, dengan mengacu pada data dasar tahunan yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah, diperlukan data ketenagakerjaan (Sakernas) sebagai variabel *input* serta data PDRB sebagai variabel *output*.

Uraian Kinerja

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan indikator yang berlawanan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 4 – 5 %. Sedangkan produktivitas daerah merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar *output* (rupiah) yang dihasilkan atas penggunaan faktor produksi *input* (orang/penduduk yang bekerja) dalam suatu perekonomian. Untuk menghitung produktivitas daerah dibutuhkan informasi data Produk Domestik Regional bruto (PDRB), dalam hal ini PDRB atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan data penduduk usia kerja yang bekerja (jumlah angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran terbuka).

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktivitas Daerah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai PDRB ADHK (Rp. Juta)	34.386.380	31.919.708**	92,82

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2021. ** angka asumsi

PDRB menurut Lapangan Usaha ADRB Kabupaten Pati pada tahun 2021 sebesar Rp31.919.000,00. Angka tersebut lebih tinggi dari Rp30.902.899.000,00 pada tahun 2020 dan mencapai 92,82% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021. Sedangkan produktivitas daerah diharapkan mencapai Rp48.700.000,00 atau melebihi tahun 2019 yang sebesar Rp47.960.000,00.

Upaya meningkatkan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah program-program yang dilaksanakan Kabupaten Pati adalah Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Pada tahun 2021 dana yang diserap Rp10.223.928.345,00 yang berarti 89,02 persen dari yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp38.570.003.600,00 menunjukkan bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar 10,08 persen.

3.2.7 Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah

Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi Meningkatkan produktivitas dan inovasi di bidang/sector pertanian, perdagangan dan industri, meningkatnya investasi daerah, daya saing daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Laju Pertumbuhan ekonomi	5,64	3,38	59,93
Inflasi Daerah	3,50	1,59*	147,00

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2021. *angka proyeksi

Uraian Kinerja

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2021 sebesar 3,38 dengan capaian kinerja 59,93 persen, turun drastis dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Sedangkan Inflasi Daerah Kabupaten Pati tahun 2021 sebesar 1,59, tercapai 147,00 persen.

Angka inflasi Kabupaten Pati selalu dibawah angka inflasi pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Capaian inflasi Kabupaten Pati dari 2017-2020 selalu dibawah target inflasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022 (kisaran 3,00%-5,00%),

yang berarti bahwa harga-harga yang berlaku di Kabupaten Pati dalam kurun waktu ini cenderung stabil/terkendali dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan indikator makro daerah yang menjadi pilar utama daya saing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan indikator lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, pembangunan manusia, serta ketimpangan distribusi pendapatan, apakah pertumbuhan tersebut berkualitas atau sebaliknya. Hal ini yang sering disebut dengan istilah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Dukungan stabilitas harga (inflasi) juga sangat menentukan kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan juga daya saing daerah.

Tabel 3.15
Perbandingan Data per Tahun
Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET
	2019	2020	2021	2022
Tingkat Laju	5,85*	5,86*	2,00	5,60
Pertumbuhan Ekonomi				
Inflasi Daerah	2,51	2,51*	1,59*	3,00

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2021. *angka proyeksi

Kabupaten Pati yang secara geografis berada pada jalur utama lalu lintas perdagangan paling padat di pantai utara bagian timur Pulau Jawa dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sebesar 5,85 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,86 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 2,00 persen pada tahun 2021. Realisasi pertumbuhan pada tahun 2021 ini telah mencapai target 2020 di RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yaitu sebesar 5,60 persen, capaian tersebut belum mencapai target pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 5,6 - 6,0 persen pada tahun 2022, dikarenakan kondisi perekonomian yang masih terdampak oleh pandemi.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun selanjutnya diharapkan dapat menembus angka lebih dari 5,86 persen. Target tersebut bisa tercapai dengan prasyarat bahwa sektor-sektor penopang perekonomian yang dominan seperti sektor industri manufaktur dapat tumbuh minimal sebesar 4,74 persen, sektor pertanian 3,81 persen, sektor perdagangan 6,67 persen, sektor konstruksi 6,12 persen dan sektor-sektor yang lain diasumsikan memiliki tingkat pertumbuhan yang tetap.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pati pada kurun waktu 2018 – 2021 dalam status terkendali dan mengalami tren penurunan serta cenderung stabil dari 2,77 pada tahun 2018. Tingkat inflasi pada tahun 2019 turun menjadi 2,51 dan stabil di level 2,51 pada tahun 2020 dan kemudian turun di tahun 2021 menjadi 1,59 yang artinya memiliki capaian sebesar 147 persen. Inflasi tahun 2021 paling dominan disebabkan oleh peningkatan harga sandang (5,50%), bahan pangan (4,62%), dan komponen penunjang lainnya yang berada pada kisaran 1,5% - 2,7%.

Terjaganya inflasi pada level yang cukup rendah dapat mendukung program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga, utamanya gejolak/peningkatan harga yang dipicu oleh harga *volatile foods* seperti sembako dan harga kebutuhan pokok lain (kategori *non administered price*) yang sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, serta harga komoditas/barang kategori *administered price* seperti harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif angkutan, yang sangat ditentukan atau menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme subsidi.

Selama periode 2017 – 2020 jumlah perusahaan industri pengolahan berskala besar dan sedang di Kabupaten Pati terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah industri besar dan sedang yang beroperasi di Kabupaten Pati tercatat 192 perusahaan dan meningkat menjadi 209 perusahaan pada tahun 2019. NTP Kabupaten Pati tahun 2019 sebesar 104,24.

NTP (Nilai Tukar Petani) merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Jumlah kunjungan wisata tahun 2020 sebanyak 422.351 wisatawan, turun dari tahun 2020 yang sejumlah 510.361 wisatawan dan merupakan dampak pandemi Covid 19 dengan terbitnya kebijakan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata).

Pertumbuhan investasi daerah pada tahun 2021 sebesar 6,02 persen dengan total investasi sebesar Rp5.554.899.861.300,00 terdiri dari nilai investasi dalam negeri sebesar Rp5.470.899.861.300,00 dan investasi asing sebesar Rp84.000.000.000,00. Meskipun pertumbuhan investasi melampaui target, masih dapat ditingkatkan kembali dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dan pemberian insentif kepada investor.

Pemerintah Kabupaten Pati mengupayakan penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan menyelenggarakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program peningkatan kemampuan teknologi industri, rogram penataan struktur industri, Program pengembangan industri kecil dan menengah, Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, Program pengembangan perikanan tangkap, Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan destinasi pariwisata dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan .

Anggaran untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah sebesar Rp42.810.621.250,00 dan menjadi Rp38.570.003.600,00 setelah perubahan, dengan serapan anggaran sebesar Rp34.333.766.585,00 atau 89,02 persen, sehingga dapat diasumsikan ada efisiensi anggaran sebesar 10,08 persen. Dengan dua indikator yang pengukurannya tercapai 35,50 persen dan 147,00 persen.

3.2.8 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan. Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dihitung dari rerata persentase Kapasitas air baku daerah, Daerah irigasi dalam kondisi baik, Jalan kondisi baik dan Jembatan kondisi baik. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 82,21 persen yang berarti capaian kinerja sebesar 110,62 persen.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi sesuai standar pelayanan	76,30	82,87	108,61

Sumber : DPU TR Kabupaten Pati Tahun 2021

Uraian Kinerja

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat penting, tersedianya prasarana jalan baik kualitas maupun kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah di jangkau (tingkat aksesibilitas). Apabila aksesibilitas di suatu daerah tinggi maka perkembangan wilayah akan mengalami kelancaran. Sehingga semakin baiknya sistem jaringan jalan dalam suatu wilayah, semakin lancar pula distribusi baik barang, jasa maupun informasi lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah tersebut.

Sarana dan prasarana yang di suatu wilayah berupa jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, kendaraan (darat, udara, dan laut), terminal, pelabuhan, dan lain-lain memberikan landasan terhadap kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Sarana dan prasarana transportasi akan menunjang dan mendukung pembangunan secara fisik. Dalam hal ini, untuk memudahkan pelayanan dan menghindari kemacetan perlu mengembangkan jaringan jalan dan jasa pelayanan dalam dengan melibatkan peran pemerintah setempat dan masyarakat serta dunia usaha.

Sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah membangun jalan sepanjang 1.132,49 kilometer jalan kabupaten. Dari total panjang jalan yang ada, di Kabupaten Pati sebesar 100 persen permukaannya sudah di aspal. Pada tahun 2021, panjang jalan yang dalam kondisi mantab sepanjang 1.132,487 kilometer (beraspal baik 956.263 kilometer dan beraspal sedang 176.224 kilometer) dari total 1.458.037 kilometer, sedangkan jumlah jembatan yang baik adalah sebanyak 313 jembatan dari total 428 jembatan. Faktor aksesibilitas memegang penting dalam upaya perkembangan wilayah sebab tanpa di dukung oleh sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi yang memadai, maka perkembangan suatu daerah akan sulit berkembang.

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah pada tahun 2021 sebesar 108,61 persen cenderung turun dari capaian kinerja 2020 sebesar 110,62 persen, meskipun demikian tetap melampaui dari target yang ditetapkan. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program

Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Perumahan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, dimana dalam pelaksanaan diberikan anggaran murni sebesar Rp246.771.424.450,00 yang kemudian dianggarkan kembali dalam anggaran perubahan sebesar Rp208.396.596.028,00 dan telah terealisasi sebesar Rp176.295.479.906,00 atau sebesar 84,60 persen, artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,40 persen.

3.2.9 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,38	52,35	81,30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2021

Uraian Kinerja

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

IKLH 2021 merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Pati yang bersumber dari data Tahun 2021. Secara spesifik, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2021 menggunakan data yang diperoleh dari :

- Indeks Kualitas Air diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai sebanyak 30 titik yang diambil sampelnya sebanyak 2 kali yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau, meliputi 5 sungai dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 1. Sungai tersebut melintas kota Pati, dan

2. Sungai prioritas untuk dikendalikan pencemarannya, karena salah satu sungai merupakan salah satu sungai yang dijadikan sebagai salah satu Intake PDAM.
 3. Sungai yang mewakili Pati bagian utara dan Pati bagian selatan Sungai-sungai tersebut adalah :
 - a. Sungai Sani (Hulu, Tengah, Hilir).
 - b. Sungai Jiglong (Hulu, Tengah, Hilir).
 - c. Sungai Lengkowo (Hulu, Tengah, Hilir).
 - d. Sungai Brati (Hulu, Tengah, Hilir).
 - e. Sungai Silungonggo (Hulu, Tengah, Hilir).
- Indeks Kualitas Udara diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara *ambien passive sampler* dan metode otomatis (*Automatic Air Quality Monitoring System*) sebanyak 2 tahap di 4 titik pemantauan yaitu :
 1. Transportasi (Kantor Setda Kab. Pati) Jl. Tombronegoro No. 1, Kaborongan, Patilor.
 2. Industri (di sekitar Perusahaan Krishna Kuningan Kec. Juwana Kab. Pati) Jl Gatot Kaca Bajomulyo Desa Bajomulyo Rt 03 / Rw 01, Kec. Juwana Kab. Pati
 3. Permukiman (Perumahan Griya Kencana 2 Desa Sidokerto Kac. Pati Kab. Pati) Jl Sunan Kalijaga No.47 Sidokerto
 4. Perkantoran (Kantor DLH Kab. Pati) Jl. Raya Pati Kudus Km 2 Pati.Sedangkan parameter yang diukur adalah SO₂ (sulfur dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida)

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak dua kali per tahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter.
 - Indeks Kualitas Lahan diperoleh dari hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Data dan Peta Ruang Terbuka Hijau diperoleh dari Dinas PUTR Kabupaten Pati dan dari Bidang Konervasi dan Kehati DLH Kab. Pati.

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan *input* data tersebut ke dalam aplikasi dari KLHK yaitu dengan akses ke <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks> diperoleh nilai IKA, IKU, IKL dan IKLH sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air Sungai	:	35,33
2. Indeks Kualitas Udara	:	76,46
3. Indeks Kualitas Lahan	:	36,99

Dengan menggunakan formulasi perhitungan maka didapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati pada Tahun 2021 dengan rumus :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$IKLH = (0,376 \times 35,33) + (0,405 \times 76,46) + (0,219 \times 36,99)$$

$$IKLH = 52,35$$

Berdasarkan hasil perhitungan IKLH Tahun 2021, IKLH Kabupaten Pati berada pada angka 52,35 memiliki arti SEDANG.

Evaluasi dan analisa kinerja

Tabel 3.18
Perbandingan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,20	54,69	53,88	52,35	69,01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2021

Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 cenderung menurun 1,53 poin dibandingkan pada Tahun 2020 yang sebesar 53,88. Penurunan terjadi pada IKU dan IKA sedangkan IKTL mengalami kenaikan. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 sebesar 76,46 turun dibandingkan IKU tahun 2020 sebesar 78,83 yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah populasi kendaraan bermotor dan meningkatnya kegiatan industry. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 35,33 naik sebesar 2,47 poin dari tahun 2020 sebesar 32,86, sedangkan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) turun 11,42 dari 48,44 pada tahun 2020 menjadi 36,99 pada tahun 2021.

Gambar 3.1
Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai di Kecamatan Gabus



Gambar 3.2
Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai di Kecamatan Pati I



Gambar 3.3
Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai di Kecamatan Pati II



Gambar 3.4
Aksi Pengukuran Indeks Kualitas Air Udara



Beberapa program untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tahun 2021 ada 8 program yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program

Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan, besar anggaran tahun 2021 Rp14.416.967.200,00 atau 0,94 persen dari total anggaran prioritas dan terealisasi sebesar Rp10.715.782.874,00 atau 79,67 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp13.449.716.700,00.

3.2.10 Menurunnya Risiko Bencana

Pengukuran tingkat capaian kinerja Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara kesiapsiagaan (serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana) dengan kapasitas (kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana).

Kenaikan maupun penurunan risiko bencana di suatu wilayah, dapat diketahui dari indeks risiko bencana. Semakin kecil kejadian bencana maka risiko yang di timbulkan semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin besar/ banyak kejadian bencana maka risiko yang ditimbulkan semakin besar. Pada tahun 2021 target capaian indeks risiko bencana Kabupaten Pati ditetapkan 144, dan realisasi pada angka 128,14.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Menurunnya Risiko Bencana

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penurunan Indeks Risiko Bencana	144	128,14	111

Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2021

Uraian Kinerja

Cara perhitungan diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana. Bahaya (*Hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (*Vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi,

kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Tabel 3.20
Kejadian Bencana Tahun 2021

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KERENTANAN		
			Kerugian (Milyar Rp)	Kerusakan Lingkungan (Ha)	Jiwa Terpapar
1	Banjir	41	93.645.000.000	6.243	342
2	Tanah longsor	5	50.500.000	1	12
3	Kekeringan	5	18.210.000.000	1.214	6.513
Jumlah		51	111.905.500.000	7.458	6.867

Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2021

Pada tahun 2021 ada 3 jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Pati yang dipergunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Risiko Bencana, yaitu: banjir, tanah longsor dan kekeringan. Kerugian yang diakibatkan sebesar Rp111.905.500.000,00 milyar rupiah dengan area terdampak seluas 7.458 (ha) dan jumlah jiwa yang terpapar sebanyak 6.867 jiwa.

Gambar 3.5
Bencana Banjir di Kecamatan Kayen



Bencana Banjir Kecamatan Kayen
17 november 2021

Gambar 3.6
Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Tlogowungu



Bencana Tanah Longsor di Desa Klumpit
Kecamatan Tlogowungu - 28 Januari

Gambar 3.7
Bencana Kekeringan di Kecamatan Tambakromo



Dropping Air Bersih Bencana Kekeringan di Desa
Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo
20 Oktober 2021

Evaluasi dan Analisa Kinerja

Tabel 3.21
Perbandingan Indeks Risiko Bencana

INDIKATOR KINERJA	Data 2017	Data 2018	Data 2019	Data 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022
Indeks Risiko Bencana	169	59,25	155	94,27	149	128,14	144

Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2021

Kondisi awal perencanaan jangka menengah daerah RPJMD, indeks risiko bencana Kabupaten Pati tahun 2017 sebesar 169, sedangkan pada tahun 2021 indeks risiko bencana Kabupaten Pati sebesar 128,14 mengalami penurunan dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 149 dimana terjadi penurunan sebesar 21 poin.

Penurunan indeks risiko bencana ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah kejadian bencana alam (banjir, banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati sehingga berpengaruh terhadap perhitungan sehingga didapatkan hasil perhitungan Risiko (R) Bencana alam di wilayah Kabupaten Pati pada Tahun 2021 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Perhitungan Risiko Bencana

RISIKO (R)	Tahun 2021
Risiko Bencana Banjir	32,59
Risiko Bencana Tanah Longsor	18,51
Risiko Bencana Kekeringan	77,03
JUMLAH	128,14

Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2021

Untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana telah dilakukan beberapa upaya yaitu :

1. Bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana melaksanakan kegiatan pembangunan penyediaan air tanah untuk air baku pada daerah kekeringan di wilayah Kabupaten Pati yang didanai oleh BBWS Pemali Juwana berupa pembuatan sumur dalam sampai dengan tahun 2021 tersebar di 6 lokasi. Dimana diharapkan pembuatan sumur dalam ini mampu membantu pemenuhan kebutuhan air bersih yang menjadi prioritas pada saat terjadi kekeringan.

Tabel 3.23
Pembuatan Sumur Dalam

Tahun	Jumlah	Lokasi
2019	4	Desa Kropak, Kecamatan Winong
		Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong
		Desa Babalan, Kecamatan Gabus
		Desa Pantirejo, Kecamatan Gabus
2020	2	Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong
		Desa Sidomukti, Kecamatan Jaken

Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2021

2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana, yaitu desa/ kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini diharapkan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa tersebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana, memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya dan tahun 2021 BPBD Kabupaten Pati memfasilitasi pembentukan desa tangguh bencana sebanyak 8 desa di wilayah Kecamatan Dukuhseti.

Tabel 3.24
Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Tahun	Jumlah	Lokasi dan Jumlah Peserta
2015	5	Kec. Pati Desa Sugiharjo, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Kosekan, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Banjarsari, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Babalan, P=10 L=20
		Kec. Jakenan Desa Karangrowo K, P=10 L=20
2017	1	Kec. Jakenan Desa Ngastorejo, P=10 L=20
2018	2	Kec. Gabus Desa Mintobasuki, P=10 L=20
		Kec. Jakenan Desa Tondomulyo, P=10 L=20
2019	4	Kec. Juwana Desa Doropayung, P=10 L=20
		Kec. Juwana Desa Bumirejo, P=10 L=20
		Kec. Juwana Desa Kedungpancing, P=10 L=20
		Kec. Jakenan Desa Bungasrejo, P=10 L=20
2020	2	Kec. Pati, Kelurahan Pati Kidul, P= 10 L=20
		Kec. Juwana, Desa Gadingrejo, P= 10 L=20
2021	8	Kec. Dukuhseti, Desa Puncel, P= 10 L=20
		Kec. Dukuhseti, Desa Tegalombo, P= 10 L=20
		Kec. Dukuhseti, Desa Alas dowo, P= 10 L=20
		Kec. Dukuhseti, Desa Banyutowo, P= 10 L=20
		Kec. Dukuhseti, Desa Bakalan, P= 10 L=20
		Kec. Dukuhseti, Desa Ngagel, P= 10 L=20
		Kec. Dukuhseti, Desa Dukuhseti, P= 10 L=20
		Kec. Dukuhseti, Desa Dumpil, P= 10 L=20

Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2021

Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah merupakan salah satu upaya

pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana diharapkan aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Tahun 2021 BPBD Kabupaten Pati melaksanakan 1 (satu) program pendukung capaian penurunan risiko bencana yaitu Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.484.383.400,00 dengan persentase (%) serapan anggaran sebesar 96 % atau realisasi anggaran sebesar Rp.468.875.450,00. Persentase (%) Tingkat Capaian Kinerja yang dilaksanakan 100 % dan dengan efisiensi sebesar 4 %.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran murni sebesar Rp2.842.495.527.000,00, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.810.086.431.250,00, belanja modal sebesar Rp350.071.832.750,00, belanja tidak terduga sebesar Rp14.000.000.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp668.337.263.000,00 yang kemudian mengalami perubahan dalam APBD Perubahan menjadi Rp2.791.827.542.000,00 dengan perincian belanja operasi sebesar Rp1.783.985.271.251,00, belanja modal sebesar Rp314.437.523.749,00, belanja tidak terduga sebesar Rp24.955.000.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp668.449.747.000,00.

Tabel 3.25
Anggaran Belanja Daerah Perubahan

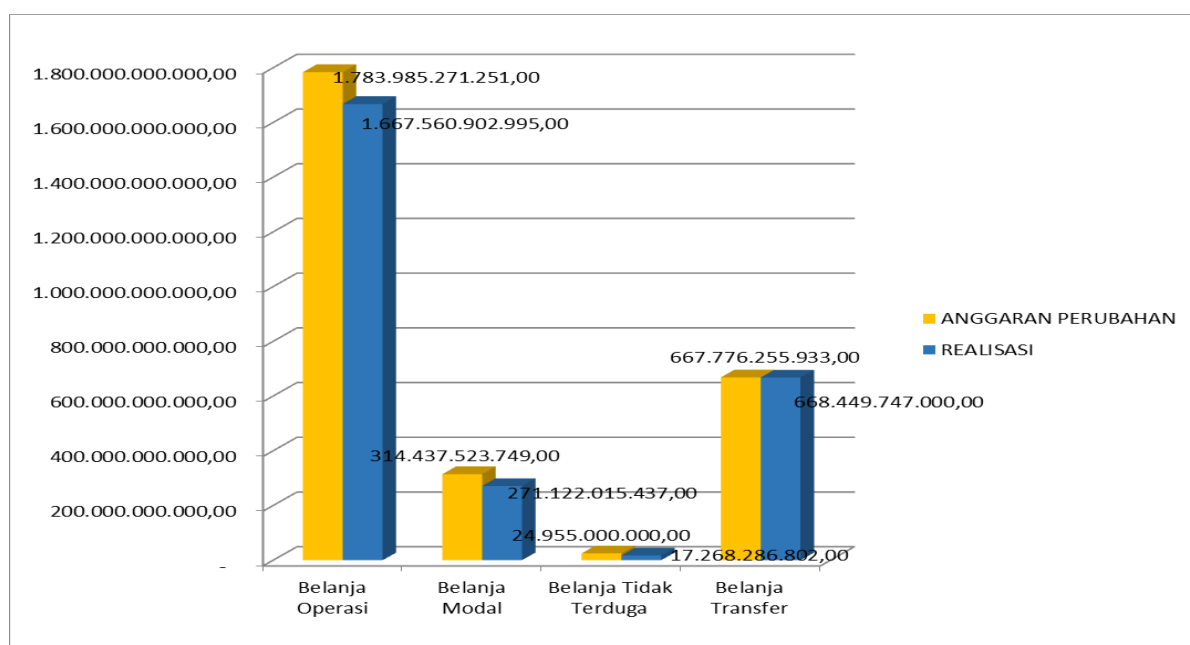
URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	%
Belanja Operasi	1.783.985.271.251	63,90
Belanja Modal	314.437.523.749	11,26
Belanja Tidak Terduga	24.955.000.000	0,90
Belanja Transfer	668.449.747.000	23,94
Total Belanja Daerah	2.791.827.542.000	100

Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2021

Total realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp2.623.727.461.167,00 dengan perincian belanja operasi sebesar Rp1.667.560.902.995,00, belanja modal sebesar

Rp271.122.015.437,00, belanja tidak terduga sebesar Rp17.268.286.802,00, dan belanja transfer sebesar Rp667.776.255.933,00.

Grafik. 3.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2021

Realisasi belanja untuk keseluruhan program sebesar Rp1.296.371.403.508,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 88,95 persen program/kegiatan di sasaran. Peningkatan kesempatan kerja lokal; dan produktivitas daerah menyerap anggaran tertinggi belanja total (98,89%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran kedua yaitu Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan (68,32%).

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam capaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Belanja Program (dalam Rupiah) Tahun 2021

NO	TUJUAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	9.794.765.000	9.366.929.000	8.468.447.150	90,41	9,59

NO	TUJUAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	429.708.013.950	464.812.795.700	317.553.699.309	68,32	31,68
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	498.682.450	248.969.750	232.873.000	93,53	6,47
4	Penurunan tingkat kemiskinan	24.577.357.650	16.165.401.950	14.619.748.980	90,44	9,56
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	745.234.633.575	772.910.942.475	756.879.403.094	97,93	2,07
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	11.996.375.000	10.338.631.750	10.223.928.345	98,89	1,11
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	42.810.621.250	38.570.003.600	34.333.766.585	89,02	10,98
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	246.771.424.450	208.396.596.028	176.295.479.906	84,60	15,40
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14.416.967.200	13.449.716.700	10.715.782.874	79,67	20,33
10	Menurunnya risiko bencana	2.830.617.200	1.425.086.250	1.382.040.850	96,98	3,02
TOTAL		1.528.639.457.725	1.535.685.073.203	1.296.371.403.508		
			Rata-rata realisasi		88,95	
			Realisasi tertinggi		98,89	
			Realisasi terendah		68,32	

Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2021

3.4 CAPAIAN PRESTASI TAHUN 2021

1). Tingkat Internasional

1. Kejuaraan Senam IC Rhythmic Gymnastic Online Internasional (3 emas, 4 perak, 1 perunggu);
2. International Science And Invention Fair 2021 (5 emas) oleh siswa SMP Negeri 3 Pati;

3. World Invention Creativity Olympic 2021 (5 emas) oleh siswa SMP Negeri 3 Pati;
4. Juara I Budokan World E-Karate Championship India Open Internasional oleh siswa SMP Negeri 3 Pati;
5. Juara II Budokan World E-Karate Championship India Open Internasional oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu;
6. Juara III Budokan World E-Karate Championship India Open Internasional oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu;
7. Juara II Asian Science And Mathematics Olympiads 2021 oleh siswa SMP Negeri 3 Pati;
8. Juara II International Kangaroo Mathematics Contest 2021 oleh siswa SMP Negeri 3 Pati;
9. Juara II World Mathematics Invitational Final Round 2021 oleh siswa SMP Negeri 3 Pati.

2). Tingkat Nasional

1. Penghargaan Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 oleh RSI Pati dari Kementerian Kesehatan RI;
2. Penghargaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021, dari Kementerian Kesehatan RI;
3. Juara 6 Tingkat Nasional Pengawasan Kearsipan Nasional;
4. Juara 3 Anugerah Pesona Indonesia kategori event budaya terpopuler (voting tahun 2020, penyerahan penghargaan tahun 2021);
5. Cabang Olahraga *e-sports* Juara 1 `TV MOBILE LEGENDS ARENA (NMA) Season 3 Tim Amatir Nasional penyelenggara NIMO TV;
6. Cabang Olahraga *e-sports* Juara 1 Indonesia *Free Fire Battlegrounds Community League* Regional Jawa Tengah;
7. Capaian 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu pada IC *Rhythmic Gymnastic Online* Nasional yang diselenggarakan oleh UNNES;
8. Capaian 1 Perak Cabang Olahraga Senam pada PON PAPUA 2021.
9. Capaian 1 Perak Cabang Olahraga Tarung Derajat pada PON PAPUA 2021;
10. Capaian 1 Emas Cabang Olahraga Hapkido pada Ekshibisi Hapkido PON PAPUA 2021;
11. Cabang Olahraga *e-sports* Juara 1 `TV Mobile Legends Arena Season 3 Tim Amatir Nasional penyelenggara NIMO TV;
12. Juara I Kompetensi Sains Nasional Tingkat Nasional Jenjang Sekolah

- Menengah Pertama Tahun 2021 oleh siswa SMP Negeri 1 Wedarijaksa;
13. Juara I Lomba KSN IPS oleh siswa SMP Negeri 1 Wedarijaksa;
 14. Juara I Kompetisi Matematika, Sains Dan Bahasa Inggris (MSI) XVIII Siswa SMP Tingkat Nasional 2021 oleh siswa SMP Negeri 3 Pati;
 15. Juara I Kompetisi Sains Terbuka Ke-5 PPO JATENG dan DIY oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu;
 16. Juara I GREENFIELDS ATF U14 BOY'S SINGLE oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu;
 17. Juara I INVITASI YUNIOR PP PELTI TUNGGAL PUTRA oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu;
 18. Juara I Taekwondo oleh siswa SMP Negeri 3 Pati.

3). Tingkat Provinsi

1. Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Kategori Top 10 Kabupaten dan Kota dari Gubernur Jawa Tengah;
2. Penghargaan Adiwiyata oleh SD Rajawali Juwana (pelaksana terbaik ke-3 Jawa Tengah), SDIT Yaumi Fatimah Pati, dan SMPN 4 Juwana dari Gubernur Jawa Tengah;
3. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 Kategori Kabupaten Terbaik I;
4. Juara 2 Kategori Pasar Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
5. Piagam Penghargaan diberikan Kepada Tim Pelaksana Terbaik Tim Pelaksana Kabupaten Pati sebagai TIM PELAKSANA KABUPATEN DENGAN SHARING ACTIVITY TERBAIK Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian PUPR Direktorat Jendral Cipta Karya Balai Prasarana permukiman Wilayah Jawa Tengah;
6. Juara Harapan 2 Lomba Pustakawan Berprestasi TK. Provinsi Jateng;
7. Peringkat I Lomba Inovasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Satpol PP Kabupaten Pati;
8. Capaian 5 Emas dan 3 Perunggu Cabang Olahraga Senam pada POPDA Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
9. Capaian 1 Emas dan 5 Perak Cabang Olahraga Senam pada *Physical Education D'Competition Virtual Artistik Gymnastics 2021*;
10. Juara I Cabang olahraga Sepak Bola pada LIGA 3 Jawa Tengah;

11. Juara I Cabang olahraga Pencak silat pada Kejuaraan Karimun Tingkat Jawa Tengah;
12. Capaian 3 Emas pada Kejuaraan Aeromodeling Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2021.
13. Capaian 1 Emas Cabang Olahraga Sepatu Roda pada POPDA Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
14. Capaian 1 Emas Cabang Olahraga Sepatu Roda pada POPDA Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
15. Capaian 1 Emas dan 1 Perak Cabang Olahraga Pentaque pada POPDA Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
16. Capaian 1 Perunggu Cabang Olahraga Bola Voli Pasir pada POPDA Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
17. Capaian 1 Perunggu Cabang Olahraga Tenis Lapangan pada POPDA Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
18. Capaian 1 Perunggu Cabang Olahraga Panahan pada POPDA Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
19. Capaian 1 Emas Cabang Olahraga Atletik pada POPDA Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
20. Capaian 4 Emas Cabang Olahraga Atletik pada Kejuaraan Provinsi Atletik Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021;
21. Juara I BOYS SCOUT COMPETITION VIII Juara 1 Lomba Kreasi Seni Putra oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu.
22. Juara I MAPSI Provinsi Cabang Tartil Putri oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu
23. Juara I POPDA Virtual Provinsi Karate Kata Beregu Putra oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu
24. Juara I KEJURPROV Virtual Karate Kata Beregu Cadet Putri oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu
25. Juara II Menulis Gurit Festival Tunas Bahasa Ibu oleh siswa SMP Negeri 1 Gabus
26. Juara II KOSN Karate Perorangan Putra oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu
27. Juara III BOYS SCOUT COMPETITION VIII oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu
28. Juara III BOYS SCOUT COMPETITION VIII Lomba Kreasi Seni Putri oleh siswa SMP Negeri 1 Tayu

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Kabupaten Pati 2017-2022 dalam mengelola kepercayaan masyarakat Kabupaten Pati. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Pandemi covid-19 masih menyelimuti dan menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Pati, namun demikian efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Pati kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja dari 14 indikator kinerja yang ditetapkan mencapai kategori sangat tinggi. Masih seperti tahun lalu, dalam suasana pandemi angka kemiskinan dan angka pengangguran mengalami peningkatan yang berdampak menurunnya pendapatan perkapita masyarakat. Pandemi yang diperkirakan bisa teratasi diakhir tahun ini kembali melonjak dengan bermutasi menjadi jenis yang baru.

Dibutuhkan sarana bagi pemangku kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya, salah satunya dengan membangun sistem yang akuntabel dalam pelaksanaan pemerintahan. Sakip merupakan sistem yang harus disempurnakan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati ke depan untuk kinerja yang lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala atas Renstra Perangkat Daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja, serta memanfaatkan hasil reviu untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi;
2. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, dan penganggaran sehingga dapat mengoptimalkan penerapan *performanced based budgeting* secara konsisten ditingkat Perangkat

- Daerah;
3. Memanfaatkan *cascading* kinerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja di tingkat penanggung jawab program, kegiatan dan sub kegiatan serta melakukan *cascading* kinerja organisasi setiap Perangkat Daerah hingga ke level individu pegawai dan memanfaatkannya untuk pengukuran kinerja individu serta sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga mendorong terwujudnya system merit;
 4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik ditingkat Pemda maupun Perangkat Daerah antara lain dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan Perangkat Daerah memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam memperbaiki perencanaan dan peningkatan kinerja;
 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah serta pimpinan Perangkat Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
 6. Meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program dengan mereviu program, kegiatan dan komponen anggaran pada seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan alokasi anggaran dapat fokus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Pati Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator tujuan yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati tahun 2021 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh *Stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pati dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dapat memberikan dampak lebih luas pada kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Pati mendatang.

Maret 2022
BUPATI PATI,

BARYANTO, S.H., M.M., M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Jabatan : BUPATI PATI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pati, 19 Januari 2021
BUPATI PATI

HARYANTO, S.H., M.M., M.SI.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	<i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	77
2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	<i>IPM</i>	72,21
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	93,00
	<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	70
4. Penurunan tingkat kemiskinan	<i>Tingkat kemiskinan</i>	9,51
	<i>Indeks Gini</i>	0,30
	<i>PDRB Perkapita</i>	37.901.200
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<i>Indek Reformasi Birokrasi</i>	64,5
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	34.386.380
7. Mekuatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,64
	<i>Inflasi Daerah</i>	3,00 – 5,00
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	76,30
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	64,38
10. Menurunnya risiko bencana	<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	144

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 204.442.882.500	APBD
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 217.300.000	APBD
3.	Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	Rp 10.444.900.000	APBD
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp 24.500.000	APBD
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 206.215.447.500	APBD
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 356.328.000	APBD
7.	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 251.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA)	Rp 68.270.896.050	APBD
9.	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	Rp 2.604.111.000	APBD
10.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 9.723.023.600	APBD
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 5.675.340.650	APBD
12.	Program Pengembangan Permukiman	Rp 2.578.704.900	APBD
13.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 59.000.011.200	APBD
14.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 98.055.558.800	APBD
15.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 180.000.000	APBD
16.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 952.550.000	APBD
17.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 653.44.700	APBD
18.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 1.468.060.600	APBD
19.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.794.184.000	APBD

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
20.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 861.200.000	APBD
21.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.950.429.500	APBD
22.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1.701.076.500	APBD
23.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 755.195.400	APBD
24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 49.386.700	APBD
25.	Program Penanganan Bencana	Rp 18.987.700	APBD
26.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 160.115.100	APBD
27.	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.045.065.000	APBD
28.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 549.470.000	APBD
29.	Program Hubungan Industrial	Rp 218.132.000	APBD
30.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 173.043.325	APBD
31.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 78.296.900	APBD
32.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 137.021.000	APBD
33.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 110.321.225	APBD
34.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.603.100.000	APBD
35.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 20.000.000	APBD
36.	Program Penetapan Tanah Ulayat	Rp 130.000.000	APBD
37.	Program Penatagunaan Tanah	Rp 120.000.000	APBD
38.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 377.185.600	APBD
39.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 369.650.000	APBD

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
40.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 175.000.000	APBD
41.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 10.000.000	APBD
42.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 133.574.000	APBD
43.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 40.000.000	APBD
44.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3.588.534.000	APBD
45.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 313.936.000	APBD
46.	Program Penataan Desa	Rp 1.287.000.000	APBD
47.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 133.471.000	APBD
48.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 829.359.000	APBD
49.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 753.764.000	APBD
50.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 13.118.450	APBD
51.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.412.709.500	APBD
52.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Rp 329.828.000	APBD
53.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 2.909.200.000	APBD
54.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 458.829.500	APBD
55.	Program Aplikasi Informatika	Rp 3.804.605.950	APBD
56.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 233.500.000	APBD
57.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 115.000.000	APBD

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
58.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 525.000.000	APBD
59.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 163.408.000	APBD
60.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 473.952.000	APBD
61.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 203.597.250	APBD
62.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 787.875.000	APBD
63.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 10.235.000.000	APBD
64.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 136.391.500	APBD
65.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 387.639.500	APBD
66.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 2.777.600.000	APBD
67.	Program Pembinaan Sejarah	Rp 40.000.000	APBD
68.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 197.742.000	APBD
69.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 25.000.000	APBD
70.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 72.091.000	APBD
71.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 15.490.000	APBD
72.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 10.563.000.000	APBD
73.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 3.091.755.000	APBD
74.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 95.000.000	APBD
75.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 325.000.000	APBD
76.	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 388.675.000	APBD
77.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 615.000.000	APBD

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
78.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 485.000.000	APBD
79.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.474.115.000	APBD
80.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 5.265.250.000	APBD
81.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 2.015.000.000	APBD
82.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 225.000.000	APBD
83.	Program Penyuluh Pertanian	Rp 3.723.164.000	APBD
84.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 8.361.000.000	APBD
85.	Program Pengembangan Ekspor	Rp 831.010.000	APBD
86.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 241.000.000	APBD
87.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 460.845.000	APBD
88.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 263.569.000	APBD
89.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 327.946.000	APBD
90.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 12.441.494.000	APBD
91.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.875.433.000	APBD
92.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 46.092.011.600	APBD
93.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 28.135.798.400	APBD

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
94. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.721.472.300	APBD
95. Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.145.763.000	APBD
96. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 685.311.846.150	APBD
97. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.204.916.350	APBD
98. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.002.760.100	APBD
99. Program Kepegawaian Daerah	Rp 4.594.448.475	APBD
100. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 7.018.410.450	APBD
101. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 673.734.000	APBD
102. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 5.491.271.700	APBD
103. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	Rp 1.069.664.300	APBD
104. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 315.209.200	APBD
105. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 4.758.124.050	APBD
106. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 597.799.000	APBD
107. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 684.552.150	APBD
108. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Rp 60.200.000	APBD

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
109. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.856.582.000	APBD
110. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 1.608.200.000	APBD
111. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp 30.000.000	APBD
112. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 70.200.000	APBD

Pati, 19 Januari 2021
 BUPATI PATI



HARYANTO, S.H., M.M., M.SI.